

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	9
1.5.2 Pendekatan Masalah	9

1.5.3	Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4	Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	12
1.6	Pertanggung Jawaban Sistematika	12
BAB II KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SECARA UMUM.....		14
2.1	Latar Belakang Konsep Hak Untuk Dilupakan.....	14
2.2	Pengaturan Hak Privasi Dan Hak Untuk Dilupakan Di Berbagai Negara	18
2.2.1	Pengaturan hak privasi dan hak untuk dilupakan di eropa.....	18
2.2.2	Pengaturan hak privasi di Australia	25
2.2.3	Pengaturan Hak Privasi Di Asia	26
2.2.3.1	Jepang	26
2.2.3.2	Singapura.....	27
2.3	Hak Privasi Di Indonesia	28
BAB III TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM DI		
INDONESIA		36
3.1	Definisi Pornografi Balas Dendam	36

3.2 Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Dalam Hukum Positif ...	37
3.2.1 Menurut KUHP	37
3.2.2 Menurut undang-undang pornografi	39
3.2.3 Menurut undang-undang ITE	40
3.3 Hak Untuk Dilupakan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	42
BAB IV	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	51
DAFTAR BACAAN	53

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang nomor 1 Tahun 1956 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)